

# ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

**Prasojo Agus Waskito**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya([prasojo.waskito@yahoo.com](mailto:prasojo.waskito@yahoo.com))

**Indri Fogar Susilowati, S.H.,M.H**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya([indrifogars@yahoo.co.id](mailto:indrifogars@yahoo.co.id))

## Abstrak

Upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor ekonomi di Indonesia salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara BUMN di Indonesia dibedakan menjadi dua yakni *perum* dan *persero*, pada *perum* lebih bertujuan pada kemanfaatan umum sedangkan pada *persero* tujuan utamanya yakni mengejar keuntungan. Ketika melaksanakan usahanya BUMN juga dimungkinkan mengalami kerugian besar yang berakibat ketidakmampuan BUMN melunasi piutang para kreditornya, oleh karena itu perlu ada regulasi yang mengaturnya yakni melalui UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam mempailitkan BUMN tidak semudah seperti mempailitkan orang ataupun badan hukum lainnya, karena dalam BUMN sebagian besar atau keseluruhan asetnya berasal dari negara, sehingga terdapat beberapa pendapat mengenai dapat atau tidaknya penerapan sitaan umum terhadap aset BUMN jika dipailitkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dalam hal mempailitkan BUMN di Indonesia dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan akibat hukum terhadap aset BUMN yang dinyatakan pailit. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan melalui studi pustaka. Bahan hukum akan diolah secara sistematis dan dikaji secara mendalam dengan menggunakan analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakikatnya BUMN dapat dipailitkan namun terdapat campur tangan pemerintah dalam hal kepailitan BUMN tersebut, karena kekayaan pada BUMN tetap dianggap sebagai kekayaan negara dan pemisahan kekayaan hanya sebatas pengelolaan BUMN saja. Keterkaitan pemerintah dalam kepailitan BUMN dapat dibuktikan dengan adanya campur tangan Menteri Keuangan dalam hal mempailitkan BUMN. Selain itu pelaksanaan sita umum terkait aset BUMN dapat dilaksanakan, namun terdapat proses tersendiri yang harus dilewati yakni Menteri Keuangan harus melakukan penghapusan barang milik negara pada BUMN terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sitaan umum dilakukan oleh pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. Hal inilah yang membedakan kepailitan BUMN dengan orang ataupun badan hukum lainnya.

**Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepailitan, Sitaan Umum**

## Abstract

One of the government's efforts in improving the economic sector in Indonesia is by forming the State Owned Enterprises (SOEs). In accordance with Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises SOEs in Indonesia divided into two namely *Perum* and *Persero*, *Perum* is more aimed at the public benefit while *Persero* has main goal of the pursuit of profit. In its operation, the SOE is also possible efforts suffered a major loss resulting inability of SOE repay the creditors, therefore, it is necessary to have a regulation that govern namely through Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. In the order to make SOE become bankrupt is not as easy as make bankrupt of person or other legal entity, because in the most of SOE's assets are from the country so that there are some perceptions as whether or not the application of the general encumbrances against the state-owned assets if it is bankrupted. The purpose of this research is to know and understand in the case of making bankruptcy of state-owned enterprises in Indonesia associated with legislation that is relevant and the legal effect of the SOEs assets were declared bankrupt. This research method is a normative legal research with the approach of the legislation and approach to the concept. The types of material used law that are the primary legal materials, secondary, and tertiary obtained through literature. Then the legal materials will be processed in a systematic and studied in depth by using prescriptive analysis. The results showed that essentially the SOE could be bankrupted, but there was government intervention in the event of bankruptcy of state enterprises, since wealth in the SOEs were still regarded as state wealth and the separating of riches merely in SOE operations only. The linkage of government in bankruptcy of SOEs could be proven by the intervention done by the minister of finance in the case make bankruptcy in SOEs. Besides the implementation of the general foreclosure-related assets of SOEs could be implemented, but there was a separated process that must be passed before the confiscation common SOEs, which the finance minister should do the removal of state property in SOEs first before implementing common confiscated by the court must pass through the Finance Minister Regulation 50 / PMK.06 / 2014 on Procedures For The Implementation Of The Abolition Of State Property. This was what distinguishes the bankruptcy of SOEs with a person or other legal entity.

**Keywords: Enterprise, Bankruptcy, Foreclosure Works**

## PENDAHULUAN

BUMN di Indonesia dalam menjalankan pelaksanaan perannya tersebut dapat diwujudkan pada hampir seluruh bidang perekonomian. Peran bidang tersebut ditujukan bagi perusahaan yang kurang diminati pada sektor swasta karena dianggap kurang menguntungkan, oleh sebab itu kemudian BUMN berperan untuk menggiatkan kegiatan pada bidang tersebut yang menyangkut hajat hidup orang banyak. BUMN juga memiliki tugas sebagai pelaksana pelayanan umum (publik), penyeimbang kekuatan swasta besar dan ikut mengembangkan usaha kecil atau koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang cukup berpengaruh dalam berbagai jenis bentuk pajak, deviden dan hasil privatisasi, adapun hal tersebut dapat diharapkan sebagai alat untuk mencapai tujuan pada bidang terutama pembangunan sebagai pendorong terciptanya korporasi.

BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuknya, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), BUMN terdiri dari dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (selanjutnya disebut persero) dan Perusahaan Umum (selanjutnya disebut perum). BUMN tidak dapat langsung berdiri dan melakukan operasional karena membutuhkan dana dan modal dari negara guna mencapai tujuannya. BUMN sangat membutuhkan penyertaan modal dari negara agar dapat menjalankan fungsi dan tujuannya guna mencari keuntungan yang dapat menjadi salah satu sumber pemasukan bagi keuangan negara.

BUMN diharapkan dapat berkembang dan maju sesuai harapan, oleh karena itu perlu diberikan otonomi dalam pengelolaannya. BUMN perlu diberikan keleluasaan untuk mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang sehat termasuk mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Upaya penyelamatan perekonomian nasional khususnya melalui Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) dapat dilakukan penyertaan modal negara oleh pemerintah sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU BUMN.

Kelangsungan kegiatan yang dilakukan oleh suatu BUMN baik berupa perum maupun persero tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN juga dapat ditimpa berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut berupa perekonomian yang melemah, menurunnya kinerja perusahaan yang meliputi organisasi, manajemen dan keuangan ikut mempengaruhi perkembangan BUMN. Pengaruh tersebut semakin berdampak kuat terhadap

turunnya tingkat produktivitas barang dan/atau jasa serta tingkat laba yang diperoleh.

BUMN tersebut akan mengalami penurunan tingkat laba yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional, sehingga lambat laun akan merugikan negara karena negara telah menanamkan modal tersebut dalam jumlah yang tidak sedikit, selain itu mengakibatkan suatu perusahaan BUMN tidak mampu melunasi hutang serta gaji kepada debitur dan para pegawainya. Untuk kepentingan dunia usaha tersebut dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya salah satunya melalui hukum kepailitan.<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) kepailitan adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan kreditor. Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditor, atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditornya.

Konsep kepailitan pada BUMN tidak boleh dibedakan, baik BUMN persero maupun perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum lainnya yang dapat dipailitkan. Disamakannya kepailitan pada BUMN dengan badan usaha lainnya karena memang UU KPKPU tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik atau BUMN dengan badan hukum privat atau swasta. Tidak dibedakannya kapasitas tersebut mengakibatkan suatu BUMN bisa dipailitkan seperti halnya badan hukum swasta lainnya.

Bahwa tidak ada masalah dalam mempailitkan suatu BUMN yang berbentuk badan hukum baik persero maupun perum, karena memang UU KPKPU juga tidak memberikan *privilege* terhadap BUMN pada umumnya dan oleh karenanya kepailitan BUMN harus dipandang sebagaimana kepailitan suatu badan hukum biasa.

BUMN pada kenyataannya jika dipailitkan tidak semudah mempailitkan orang-perorangan maupun badan hukum lainnya. Mempailitkan suatu BUMN menimbulkan banyak permasalahan mulai dari status kepemilikan modal hingga akibat hukum dari pernyataan pailit itu sendiri terkait masalah pelaksanaan sita jaminan aset. Oleh karena itu dalam hal mempailitkan BUMN

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 321

perlu lebih mencermati aturan serta regulasi yang telah ada.

Terjadinya kebangkrutan terbukti dengan adanya beberapa gugatan maupun permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN, misalnya PT Utama Karya, PT Tridarma Wahana, PT Jasindo, PT Dirgantara Indonesia, PT IGLAS, PT Dok Kodja Bahari, PT Kertas Gowa, PT Istaka Karya, PT Industri Soda Indonesia dan lain-lain. Beberapa kasus kepailitan BUMN tersebut ada beberapa dinyatakan pailit, walaupun pada akhirnya tidak ada yang dapat dinyatakan pailit. Apabila dinyatakan pailit di pengadilan niaga akan dibatalkan di tingkat kasasi, atau apabila dikabulkan di tingkat kasasi akan dibatalkan di tingkat peninjauan kembali.

Ketidaksesuaian terhadap putusan pengadilan hakim atas permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat Mahkamah Agung terdapat pemahaman yang berbeda, tidak saja di kalangan hakim tetapi juga di kalangan praktisi hukum dan akademis bahkan pemerintah, salah satunya mengenai kedudukan hukum kekayaan BUMN terhadap keuangan negara. Pentingnya mencermati aturan berkenaan dengan hal mempailitkan BUMN sangat diperlukan dalam hal ini, apabila terjadi pemahaman yang berbeda, kelak akan menimbulkan suatu persepsi yang berbeda.

Rancunya konsep kekayaan negara yang dipisahkan dalam UU BUMN dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sehingga mengakibatkan persepsi yang berbeda apabila suatu BUMN dipailitkan berkenaan pelaksanaan sita jaminan. Apabila kekayaan perusahaan negara termasuk kedalam kekayaan negara, maka dalam hal sita jaminan tidak dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU PN), padahal apabila suatu perusahaan negara berbadan hukum memenuhi syarat untuk dipailitkan maka tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan negara tersebut dapat dipailitkan, sehingga akan tunduk pada UU KPKPU dimana esensi dari kepailitan itu sendiri ialah sitaan umum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah yakni bagaimanakah mempailitkan BUMN di Indonesia dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan serta apakah akibat hukum terhadap aset BUMN yang dinyatakan pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dalam hal mempailitkan BUMN di Indonesia dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan akibat hukum terhadap aset BUMN yang dinyatakan pailit.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,<sup>2</sup> dimana isu hukum yang diangkat pada penelitian ini ialah konflik norma antara pasal 50 UU PN dengan pasal 1 angka 1 UU KPKPU, pada penelitian hukum ini akan membahas mengenai kepailitan pada BUMN.

Jenis bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan melalui studi pustaka. Bahan hukum akan diolah secara sistematis dan dikaji secara mendalam dengan menggunakan analisis secara preskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologi kasus yang sesuai dengan rumusan masalah yakni pada kasus kepailitan PT IGLAS (Persero) dimana PT IGLAS (Persero) merupakan BUMN dibidang industri dan gelas yang pernah dimohonkan pailit oleh seorang kreditornya, awal mula permohonan tersebut terjadi karena kesepakatan antara PT Interchem Plasagro Jaya dengan PT IGLAS (Persero) berkenaan dengan perjanjian kerjasama dalam hal jual beli chemical. Perjanjian tersebut juga menghasilkan kesepakatan bahwa harga chemical sesuai dengan purchase order yakni sebesar US\$ 165,816.38 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas tiga puluh delapan sen dolar Amerika) atau sekitar Rp.102.531.936.00, (seratus dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), PT Interchem Plasagro Jaya sebagai pihak yang mengadakan dan telah mengirimkan chemical kepada pemesan yakni PT IGLAS (Persero). Pengiriman chemical tersebut tidak dibarengi dengan pembayaran secara langsung sehingga lambat laun PT IGLAS (Persero) tidak sanggup membayar atau tidak dapat melunasi hutangnya yang telah melewati jangka waktu pembayaran pada pihak PT Interchem Plasagro Jaya tersebut.

PT IGLAS (Persero) juga mempunyai hutang kepada PT. AKR Corporindo Tbk karena adanya surat perihal outstanding piutang dari PT AKR Corporindo Tbk kepada PT IGLAS (Persero) No.05/AKR/07/2007 tanggal 13 juli 2007. Hutang tersebut bernilai sebesar US\$ 108.225 (Seratus delapan ribu dua ratus dua puluh lima dollar AS) atau sekitar Rp. 254.002.073 (dua ratus lima puluh empat juta dua ribu tujuh puluh tiga rupiah). Ketika PT IGLAS (Persero) dianggap tidak mampu membayar dan melunasi hutangnya kepada PT Interchem Plasagaro Jaya dan PT AKR Corporindo Tbk, maka hal tersebut

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 35

membuktikan bahwa sesungguhnya PT IGLAS (Persero) sedang berada pada keadaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban terhadap para krediturnya.

PT IGLAS (Persero) atau termohon juga mengakui bahwa sesungguhnya perusahaannya memang mempunyai hutang yang telah jatuh waktu pembayaran dan dapat ditagih. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui telah terpenuhinya unsur terkait syarat dipailitkannya suatu badan usaha yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yakni dengan adanya unsur dua kreditor atau lebih kreditor lain. Sesuai pertimbangan pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tersebut maka PT Interchem Plasagro jaya mengajukan permohonan pailit pada pengadilan niaga Surabaya terhadap PT IGLAS (Persero) karena adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hasil putusan dari putusan pengadilan niaga Surabaya No.1/Pailit/2009.PN.Niaga Surabaya Tertanggal 31 maret 2009 menolak permohonan pailit tersebut.

PT Interchem Plasagro melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung karena tidak dikabulkannya permohonan pailit oleh majelis hakim, oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No.397 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 30 juli yang pada intinya mengabulkan permohonan kasasi yang dimohonkan oleh PT Interchem Plasagro dan membatalkan putusan pengadilan niaga Surabaya No.1/Pailit/2009.PN.Niaga Surabaya. Pertimbangan majelis hakim ditingkat kasasi dalam mengabulkan permohonan pailit beranggapan bahwa PT IGLAS (Persero) termasuk BUMN yang tujuan utamanya untuk mencari keuntungan, dimana hal tersebut merupakan tujuan awal suatu PT, sehingga sesuai dengan pasal 2 UU KPKPU permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditornya. Majelis hakim juga berpendapat bahwa pengadilan niaga Surabaya telah salah menerapkan hukum. PT IGLAS (persero) selaku termohon pailit menanggapi putusan kasasi No.397 K/Pdt.Sus/2009 dan mengajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan kepada Mahkamah Agung melalui kepaniteraan pengadilan negeri Surabaya tanggal 15 oktober 2009. Hal tersebut melahirkan putusan PK No.111 PK/Pdt.Sus/2009 yang pada intinya majelis hakim mengabulkan permohonan PK oleh PT IGLAS (persero).

## PEMBAHASAN

### Mempailitkan BUMN di Indonesia Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Relevan.

BUMN memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU BUMN, kekayaan tersebut diperoleh dari pemisahan APBN oleh negara dan untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN baik persero maupun perum. Dipisahnya kekayaan negara dari APBN tersebut memiliki maksud untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN

yang selanjutnya pengelolaan dan pembinaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pemisahan tersebut tidak semata-mata pemisahan secara keseluruhan, namun dipisahkan disini hanya sebatas pengelolaannya saja.

Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan dari pasal 4 ayat (6) UU BUMN memberlakukan PP nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT (selanjutnya disebut PP TPPMN pada BUMN dan PT), pada pasal 1 angka 7 PP TPPMN pada BUMN dan PT menegaskan bahwa konsep dari penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau PT dan dikelola secara korporasi. Modal yang diberikan negara pada BUMN tadi akan dikelola secara korporasi berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat, disini jelas bahwa pengaturan pemisahan kekayaanpun diatur oleh PP yang mana hal ini termasuk perwujudan dan campurtangan pemerintah dalam hal pengaturan BUMN. Mahkamah Agung memiliki pendapat terkait dengan status kekayaan pada BUMN dimana pendapat tersebut dituangkan pada fatwa Mahkamah Agung WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang pemisahan kekayaan Badan Usaha Milik Negara pada Kekayaan Negara.

Fatwa Mahkamah Agung WKMA/Yud/20/VIII/2006 tersebut menghasilkan suatu simpulan bahwa memang kekayaan negara yang ada pada BUMN tersebut dipisahkan hanya sebatas pengelolaannya saja, yang selanjutnya pengelolaan itu akan didasarkan pada prinsip korporasi sebagai bukti bahwa BUMN merupakan badan usaha yang berlandaskan pada prinsip usaha yang sehat. Hal ini dapat dibuktikan dengan sifat dari jenis BUMN itu sendiri yakni Persero yang berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT dan Perum yang mengikuti prinsip *good corporate governance*.

Pemisahan kekayaan yang dimaksud pada UU BUMN tersebut tidak semata-mata menghilangkan andil negara dalam keikutsertaan pada BUMN, pemisahan tersebut dipisahkan hanya sebatas tindakan-tindakan operasional pengelolaannya saja yang dilakukan BUMN guna melakukan suatu usaha yang baik. BUMN diberikan keleluasaan untuk mengelola perusahaannya berdasarkan peraturan yang telah ada, hal ini dibuktikan dengan adanya suatu kebijakan dari pemerintah kepada BUMN untuk mengelola perusahaannya dengan baik, oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan menteri negara badan usaha milik negara nomor: Per- 09 /Mbu/2012 tentang perubahan atas peraturan menteri negara badan usaha milik negara nomor Per-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN yang diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan usaha BUMN yang baik.

BUMN di Indonesia hanya berbentuk Persero dan Perum, pasal 1 angka 2 UU BUMN menyebutkan Persero merupakan PT yang modalnya terbagi dalam

saham yang seluruh atau minimal 51% sahamnya dikuasai negara dan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Intinya suatu persero berlaku ketentuan dan prinsip UU PT serta cenderung mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga modalnya tak hanya diperoleh dari negara saja tapi juga didapat dari masyarakat, meskipun sebagian besar modal dari persero berasal dari negara namun masyarakat juga berhak memberikan andil dalam suatu RUPS, jadi pada persero saham tidak sepenuhnya dikuasai negara melainkan terbagi atas investor lainnya, namun suara terbesar tetap berada pada negara yang diwakili oleh menteri keuangan. Perum sesuai pasal 1 angka 4 UU BUMN merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu perusahaan serta keseluruhan modalnya murni berasal dari negara.

Persero dalam memperoleh status badan hukum sama halnya dengan PT, sehingga persero memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan pada Perum berlaku ketentuan pada pasal 35 UU BUMN terkait dengan perolehan status badan hukum, dimana pada pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Pendirian perum disahkan dan diundangkan dalam Tambahan Berita Negara RI untuk memperoleh status badan hukumnya. Oleh karena itu akta pendirian perum berbeda dengan persero dimana tidak perlu dilakukan pengesahan oleh kementerian hukum dan HAM.

Pada BUMN dapat dimungkinkan terjadinya kepailitan karena hal tersebut merupakan akibat dari sistem pengelolaan operasional yang kurang optimal, kepailitan pada BUMN juga didasarkan pada UU KPKPU dimana aturan tersebut disamakan dengan suatu perusahaan sebagaimana mestinya, BUMN sendiri tidak diberikan *previlage* selain itu pengaturan mengenai BUMN dimungkinkan terjadinya kepailitan juga diatur pada pasal 7 PP No. 12 Tahun 1998 tentang Persero maupun pada pasal 25 Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1998 tentang Perum. Regulasi tersebut menyatakan bahwa suatu BUMN memang dapat dipailitkan hanya saja terdapat kesulitan tersendiri dalam mempailitkan suatu BUMN, yakni terkait adanya aset negara yang berada pada BUMN itu sendiri sehingga terdapat campurtangan pemerintah dalam hal kepailitan tersebut, karena dianggap bahwa pemerintahlah yang memiliki kuasa terbesar pada BUMN terkait modal yang ia tanamkan. Oleh karena itu pemerintah memiliki hak untuk ikut serta berkenaan dengan dipailitkannya perusahaan negara tersebut.

BUMN juga sulit dipailitkan karena bagaimanapun juga BUMN merupakan perusahaan negara yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat dimana terdapat keterkaitan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya. Pada BUMN campurtangan pemerintah dapat diketahui dengan adanya kementerian BUMN yang

memiliki tugas dalam penyelenggaraan dan pembinaan BUMN serta membantu presiden dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan negara. Menteri BUMN bertugas dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dibidang BUMN, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan BUMN serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kementerian BUMN.

Menteri keuangan sebagai bendahara umum juga mengatur kegiatan finansial BUMN yang memang dikaitkan dengan penyertaan modal negara pada BUMN, sehingga terdapat aturan yang menganggap bahwa modal negara yang disetor pada BUMN termasuk kedalam ruang lingkup keuangan negara, pasal 1 angka 1 UU KN menganggap bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara serta berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Selanjutnya mengenai ruang lingkup keuangan negara berdasarkan pasal 2 huruf g UU KN meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. UU PN juga mengaitkan bahwa kekayaan yang dipisahkan termasuk kedalam ruang lingkup perbendaharaan negara seperti apa yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 UU PN.

Mahkamah konstitusi menerima adanya permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan UU KN dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sehingga mahkamah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang pada intinya bahwa pada hakikatnya BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, di bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. Sebagai kepanjangan tangan negara BUMN atau BUMD berlaku ketentuan konstitusional yang terdapat dalam BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 33 untuk pengaturan bidang ekonomi dan pasal 34 untuk pengaturan kesejahteraan sosial sesuai UUD NRI 1945.

Keuangan negara yang pada prinsipnya meliputi penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah, secara luas ruang lingkup keuangan negara terutama menyangkut kekayaan negara yang dikelola pihak lain termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. Keuangan yang disetor pada BUMN merupakan hasil dari APBN dimana diperoleh dari rakyat dan seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, oleh karena itu perlu ada campur tangan pemerintah ataupun negara terkait harta yang diberikan pada BUMN. Fungsi Pemerintah tersebut juga diharapkan sebagai cara agar

tidak ada penyalahgunaan mengenai kekayaan yang telah diberikan negara pada BUMN.

Ruang lingkup keuangan negara terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan, oleh karena itu pengelolaan keuangan negara berlaku dua rezim hukum, yaitu hukum keuangan negara yang mengatur pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan berupa APBN/APBD, dan rezim hukum korporasi yang mengatur pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan UU KN, UU PN serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tersebut menganggap bahwa penyertaan modal pada BUMN termasuk kedalam keuangan negara sehingga apabila perusahaan BUMN dipailitkan maka terdapat aturan lain yang memang harus dilewati. Kaitannya apabila rezim keuangan negara terdapat pada kepailitan BUMN maka perlu ada pihak yang dilibatkan seperti Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Presiden, atau DPR.

Kepailitan pada BUMN ini memiliki aturan yang spesifik dibandingkan dengan perusahaan lainnya karena aset pada BUMN termasuk kedalam ruang lingkup keuangan negara sehingga perlu melewati aturan yang khusus yakni melalui peraturan menteri keuangan No.50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara, selain itu terdapat kewenangan menteri keuangan selaku wakil pemerintah dalam kaitannya apabila BUMN dipailitkan karena tiap jenis BUMN baik persero ataupun perum dikontrol oleh menteri keuangan meskipun kedudukan menteri keuangan pada tiap jenis BUMN tidak sama. Perbedaan dari kedua jenis BUMN tersebut dapat diketahui pada Pasal 13 UU BUMN yang menyebutkan bahwa organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris, sedangkan organ pada perum dijelaskan pada pasal 37 UU BUMN organ perum ialah menteri, direksi dan dewan pengawas. Pada Perum kedudukan Menteri adalah sebagai organ yang pemegang kekuasaan tertinggi serta mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau peraturan pemerintah tentang pendiriannya.

Perbedaan organ yang terdapat persero maupun perum membuat kewenangan suatu menteri berbeda, pada pasal 1 angka 5 UU BUMN memberikan gambaran bahwa pada persero menteri adalah seseorang yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara, sedangkan pada perum menteri sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sehingga menteri pada persero bergabung sebagai RUPS dan pada perum menteri sebagai pemilik keseluruhan modalnya, terdapat perbedaan kewenangan menteri keuangan terkait masalah kepailitan persero dan perum. Kedudukan menteri keuangan dalam persero sebagai pemegang saham atau bagian dari RUPS, sehingga apabila persero mau dipailitkan oleh debiturnya sendiri maka haruslah mendapatkan persetujuan dari anggota RUPS yang lain terlebih dahulu, karena dalam persero saham terbagi atas negara dan swasta maka menteri keuangan memiliki suara

terbesar dalam RUPS apabila kepailitan diajukan sendiri oleh debiturnya, dan saham terbesar dipegang oleh negara yang diwakili oleh menteri keuangan.

BUMN jika dipailitkan baik persero maupun perum juga memiliki beberapa perbedaan diantaranya seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (5) UU KPKPU, yang menyebutkan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU BUMN dinyatakan bahwa BUMN yang bergerak bagi kepentingan publik adalah perum bukan merupakan jenis persero. Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum bagi penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan.

Menteri keuangan dapat mempailitkan perum alasannya karena menteri keuangan memiliki pertimbangan seperti mengetahui keadaan atau kondisi perum sesungguhnya. Menteri dapat mempailitkan perum karena selain sebagai penyelamat perekonomian negara, menteri juga bertindak mewakili negara dalam mengetahui perekonomian negara secara keseluruhan. Jadi menteri dapat mempailitkan perum berdasarkan amanat dari pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, selain itu modal BUMN berasal dari rakyat dan harus digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu perlu ada campur tangan pemerintah dimana menteri keuangan dan menteri BUMN selaku perwakilan negara untuk mengawasi kegiatan perekonomian BUMN.

Dari uraian pasal 104 UU PT dapat dipahami bahwa direksi perusahaan juga dapat mengajukan permohonan pailit pada persero, namun harus mendapatkan persetujuan dari RUPS yang suara terbesarnya diwakili oleh menteri keuangan selaku pemegang saham terbesar pada sebuah persero, sehingga ketika menteri keuangan menganggap bahwa suatu perusahaan persero tersebut layak untuk dipailitkan, maka menteri keuangan memberikan suara terbesar dalam RUPS dan suara menteri keuangan bersifat mayoritas dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

Terhadap kepailitan persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT, maka syarat kepailitan persero mengikuti kepailitan pada PT dimana apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta dapat diajukan permohonan pailit oleh debitor dan para krediturnya. Hal lain yang dapat ditemui pada pasal 2 ayat (5) UU KPKPU yakni apabila debitor adalah Persero dibidang perbankan dan pasar modal maka yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah oleh OJK. BUMN

baik persero maupun perum jika dipailitkan pengajuan permohonan pailit sama seperti halnya kepailitan badan hukum biasa yakni dengan sederhana (sumir) seperti terlihat dalam Pasal 2 ayat (1).

#### **Akibat Hukum Terhadap Aset BUMN yang Dinyatakan Pailit.**

Penjatuhan putusan pailit oleh pengadilan mengakibatkan debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang masuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan kepailitan itu. Kepailitan menjadi salah satu penyelesaian yang cukup memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan diberlakukannya kepailitan maka hal ini akan memberikan perlindungan bagi semua pihak, sehingga BUMN dalam melakukan usahanya dapat leluasa melakukan hubungan bisnis dengan pihak lain, tanpa menimbulkan keraguan bagi mitra bisnisnya.

Akibat hukum lainnya adalah apabila ketika setelah proses kepailitan berakhir, harta benda perusahaan BUMN tidak mencukupi untuk pembayaran hutang-hutangnya kepada kreditor dan perusahaan BUMN dimungkinkan tidak dapat berkembang serta melanjutkan usahanya lagi, maka BUMN dapat dimungkinkan untuk bubar dan tidak mendapatkan rehabilitasi terkait akibat putusan pailit tersebut.

Pembubaran terkait status BUMN Persero dan Perum tersebut perlu adanya campur tangan pemerintah karena terkait kepemilikan modal terbesar pada perusahaan BUMN tersebut, sehingga pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yakni diatur pada PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut PP P4BUMN).

Pembubaran BUMN Persero dilakukan hampir sama dengan ketentuan dan prinsip prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dimana seperti halnya PT biasanya yang mengikuti kaidah dan aturan dari UU PT. Pembubaran Persero karena keputusan RUPS tersebut diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan yang mana telah dikaji bersama dengan menteri keuangan. Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero dapat mengikutsertakan menteri teknis, menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen. Persero apabila dibubarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (3) PP P4BUMN dilakukan atas inisiatif menteri teknis, maka inisiatif tersebut harus disampaikan kepada menteri untuk selanjutnya dikajian dan dikoordinasikan oleh menteri. Menteri segera mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS.

Pembubaran Perum didasarkan pada Pasal 83 huruf a yakni ditetapkan oleh peraturan pemerintah berdasarkan usulan menteri. Pengadilan dapat

membubarkan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan dapat membubarkan perum sesuai pasal 83 huruf c atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perum melanggar kepentingan umum. Selain itu dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula dapat dilakukan penunjukan likuidator. Dalam hal Perum bubar sesuai Pasal 83 huruf e karena debitur dalam keadaan *insolvensi*, maka pembubaran itu didasarkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Menteri akan segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (4).

Akibat apabila perum dinyatakan bubar oleh menteri keuangan maka berlakulah pasal 90 yang menyatakan bahwa dalam hal Perum bubar, maka Perum tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Tindakan pembereskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perum, penentuan tata cara pembagian kekayaan, pembayaran kepada para kreditor, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembereskan kekayaan. Dalam hal Perum sedang dalam proses likuidasi, maka pada surat keluar dicantumkan perkataan 'dalam likuidasi' di belakang nama Perum.

Berdasarkan pasal 91 atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang Perum melebihi kekayaan Perum. Dalam penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pula hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tugas dan kewajiban likuidator. Likuidator yang ditunjuk oleh menteri sesuai pasal 92 bertanggung jawab kepada menteri atas likuidasi yang dilakukan.

Berdasarkan pasal 93 ayat (1) dan (2) sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi menteri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembubaran Perum. Menteri langsung menyetero sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas negara. Likuidator wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai pasal 93 ayat (3) mengenai hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya keputusan menteri atau



pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa BUMN apabila dipailitkan tidak semudah seperti mempailitkan orang ataupun badan hukum lainnya, karena dalam BUMN ini terdapat aset negara yang memang pengaturannya harus ada campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Menteri Keuangan selaku penanggung jawab finansial dan pemegang saham mayoritas pada BUMN persero serta Menteri BUMN sebagai pengelola dan pengawas kinerja BUMN, selain itu adanya aturan-aturan yang mendukung yakni UU KN, UU PN serta Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada BUMN tetap termasuk kedalam kekayaan negara. Ketika BUMN persero dipailitkan oleh debitornya sendiri, maka menteri keuangan selaku RUPS memiliki suara terbesar dalam memberikan pendapat terkait dipailitkannya BUMN, pada perum menteri keuangan memiliki kekuasaan tertinggi dan satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan.

Akibat hukum dari BUMN yang dinyatakan pailit yakni pelaksanaan sitaan umum, namun pada BUMN terlebih dahulu harus melalui proses penghapusan barang milik negara sesuai dengan Permenkeu No. 50/PMK.06/2014 karena barang BUMN tetap dianggap barang milik negara. Pembubaran suatu BUMN juga ditetapkan dengan PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN karena BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara.

### **Saran**

Berdasarkan penjabaran dan kesimpulan yang dibuat, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah melalui lembaga legislatif untuk diharapkan memberi perubahan peraturan yang ada pada UU PN terkait dengan dipailitkannya suatu BUMN, serta perlu adanya harmonisasi antara pasal 50 UU PN dengan pasal 1 angka 1 UU KPKPU. Perubahan dari DPR tersebut diharapkan memberikan kejelasan mengenai aturan penerapan sitaan umum terhadap aset milik BUMN baik pada Persero maupun Perum pailit, sehingga jelas bahwa kekayaan milik BUMN dapat dilakukan sitaan umum karena untuk kepentingan suatu perkara perdata, dimana hal tersebut digunakan untuk melindungi kepentingan dari BUMN pailit itu sendiri maupun kepentingan kreditornya dari kerugian yang lebih besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, R. Rido. 1987. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Bandung: Alumni

- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Mataram: Erlangga
- Black, Henry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publisher Co
- Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fuady, Munir. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar Atas Kepailitan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Hartini, Rahayu. 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press
- Ichsan , Achmad. 1993. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rido, Ali. 1981. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*. Bandung : Alumni
- Saliman, Abdul, Hermansyah dan Ahmad Jalis. 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana
- Sembiring, Sentosa. 2004. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Subekti, Raden dan Tjitrosoedibyo. 1989. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa
- Subhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Suryani, Bhekti. 2015. *215 Tanya Jawab Perseroan Terbatas*. Jakarta: Laskar Aksara
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni



- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. 2002. Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wijaya, I. G. Ray. 2000. Hukum Perusahaan, Bekasi: Kesaint Blanc
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2004 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430 tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian , Lembaran Negara Nomor 212 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355 Tahun 2012;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 182 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 Tahun 1998;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan , Lembaran Negara Nomor 111 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 Tahun 2011;
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 182 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 Tahun 1998;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731 Tahun 1998;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (Perum), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3732 Tahun 1998;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan perjan kepada Menteri BUMN, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556 Tahun 2005;
- Ikhwan, Mufarrijul, 2014, Jurnal Hukum, Vol 9 No.2: Reevaluasi Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Privatisasi BUMN di Indonesia, Madura: E-Journal Trunojoyo Madura
- Irianto , Catur, 2014. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan
- Khairandy, Ridwan, 2009, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.16 No.1: Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Marheny , Lily, 2012, Kedudukan Benda Jaminan yang Dibebeani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi dalam Hal Debitur Pailit dari Perspektif Hukum Kepailitan, Tesis Magister Ilmu Hukum pada UNUD Bali: tidak diterbitkan
- Pratolo, Suryo, 2007, Jurnal dan Prosiding SNA, Vol. 10 No.2: Good Corporate Governance Dan Kinerja Bumn Di Indonesia: Aspek Audit Manajemen Dan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Eksogen Serta Tinjauannya Pada Jenis Perusahaan, Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X di UNHAS
- Purwadi , Ari, 2011, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. XVI No. 3: Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank

Yang Bermasalah, Surabaya: E-Journal UWK Surabaya

Rahadiyan, Inda, 2013, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No.4: Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Safitri, Fahriza Nurul, 2008, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia (Persero) Dan PT Istaka Karya (Persero), Tesis Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana UI: tidak diterbitkan

